



**Judul** : Tekan Angka Pengangguran : MPR Mendesak Pemerintah Jalankan UUD 1954  
**Tanggal** : Sabtu, 11 Juli 2020  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Tekan Angka Pengangguran MPR Mendesak Pemerintah Jalankan UUD 1954

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong pemerintah menjalankan mandat Pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara utuh. Sebab, pasal dalam konstitusi itu memandatkan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, pemerintah harus menjalankan mandat Pasal 27 UUD 1945 secara utuh. Menurutnya, amanat konstitusi itu sangat penting untuk dijalankan karena menyangkut persoalan kemanusiaan.

“Mengutip Bung Karno sebagai penemu atau pencetus Pancasila. Bangsa kita bukanlah bangsa kuli dan kita bukan kuli di antara bangsa-bangsa di dunia. Itu penting,” ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, dalam diskusi bertajuk “Perlindungan dan Pemberdayaan Purna PMI di Ruang Wartawan, kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Umum PKB ini meyakini, Presiden Jokowi mampu menjalankan amanah Presiden Pertama RI. Namun, Gus Jazil memahami kondisi pemerintah yang sedang mengalami kesulitan dari segala arah lantaran pandemi Covid-19.

“Kenapa saya mulai dari sini, karena untuk mengukur indeks negara itu maju atau tidak, dimulai dari mengukur tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kalau penganggurannya tinggi, negara itu disebut negara tidak maju,” papar dia.

Meski begitu, Gus Jazil berharap, pemerintah tetap melakukan terobosan untuk mengurangi tingkah pengangguran. Hal itu telah terlihat dalam postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yang difokuskan untuk mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Karena ada corona, anggaran itu terpecah dan tak

fokus pada tujuan asalnya. Dampaknya sekarang, angka pertumbuhan (ekonomi) turun dan hal itu mendorong lonjakan angka pengangguran,” sesal dia.

Ke depan, harap dia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Komisi IX DPR bersinergi untuk membantu pemerintah menekan angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi dari segi ketenagakerjaan.

“Berhubung ada pihak BP2MI yang membidangi ketenagakerjaan, kita harus mampu mencari kemuliaan lewat pekerjaan yang halal. Jika di dalam negeri belum menemukan pekerjaan yang layak dan halal, mereka mengambil pilihan untuk bekerja ke luar negeri,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengungkapkan, rencana BP2MI membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan mafia pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Satgas bertugas untuk memberhentikan para agen pengirim pekerja migran ilegal yang selama ini masih marak terjadi di Indonesia.

“Bendera Merah Putih tidak boleh berkibar lebih rendah di bawah posisi bendera-bendera perusahaan. Saya siap membongkar praktik mafia yang ada di berbagai tempat termasuk di lingkungan BP2MI,” tegas Benny.

Benny berharap, DPR mendukung rencana tersebut. Sebab, BP2MI tak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi para mafia dan berbagai oknum yang tersebat di setiap sektor.

“Saya yakin, sebagian besar elemen bangsa mendukung upaya kami dalam memberantas mafia, tak menginginkan para mafia terus berkuasa di republik ini. Dalam kesempatan ini, saya meminta DPR dan rekan-rekan media untuk membantu BP2MI mewujudkan cita-cita tersebut,” tandasnya. ■ ONI